

**ANALISIS PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
SISTEM PELAPORAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN  
PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PUBLIK**

**(Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Temanggung)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :  
**Risha Dwi Lestari**  
NPM. 15.0102.0187

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019**

**ANALISIS PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
SISTEM PELAPORAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN  
PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PUBLIK**

**(Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Temanggung)**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :  
**Risha Dwi Lestari**  
NPM. 15.0102.0187

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

(Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

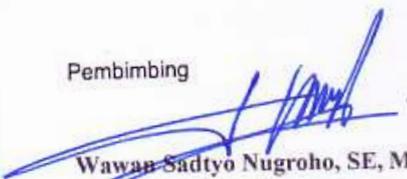
**Risha Dwi Lestari**

NPM 15.0102.0187

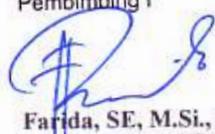
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Juli 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

  
Wawan Sadtyo Nugroho, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing I

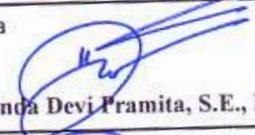
  
Farida, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II

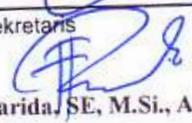
Tim Penguji

  
Muji Mranjati, S.E., M.Si, Ak, CA.

Ketua

  
Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.

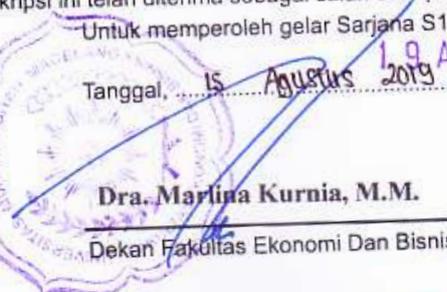
Sekretaris

  
Farida, SE, M.Si, Ak, CA

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 15 Agustus 2019

  
Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risha Dwi Lestari  
NIM : 15.0102.0187  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Magelang, 15 Agustus 2019



**RISHA DWI LESTARI**  
15.0102.0187

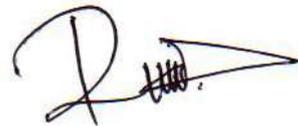
## **RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Risha Dwi Lestari  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Temanggung, 15 September 1996  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Grubug, Wonotirto, Bulu, Temanggung

### **Pendidikan Formal :**

**Sekolah Dasar** (2003-2009) : SD N 3 Wonotirto  
**SMP** (2010-2012) : SMP N 3 Bulu  
**SMA** (2012-2015) : SMKI Kasihan Bantul  
**Perguruan Tinggi** (2015-2019) : Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, Agustus 2019



**RISHA DWI LESTARI**  
**15.0102.0187**

## **MOTTO**

- ❖ “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”

**(Q.S. ALAMNSYRA : 6-8)**

- ❖ “Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan adalah cita-cita”

**( Kahlil Gibran)**

- ❖ “Sesuatu yang paling berharga adalah detik-detik yang telah kita lewati, karena kita tidak bisa mengulanginya kembali”

**(Alexandria)**

- ❖ “Terjatuh adalah awal dari kebangkitan, kesalahan adalah awal untuk menuju perubahan dan kegagalan adalah awal dari pengalaman yang berharga, karena hidup itu merupakan perjuangan menuju yang lebih baik”

**(Amin Johanda)**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT saya persembahkan Skripsi ini untuk ;

- ❖ Cahaya dihidupku Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan dan doa restunya dengan penuh ketegaran, keikhlasan serta kesabaran kepada saya untuk mencapai semua impian.
- ❖ Keluarga besar saya serta kakak, kakak ipar, dan ponakan tercinta yang selalu mendoakan serta membantu saya baik secara moril mauppun spiritual.
- ❖ Buat suami tersayang, terimakasih untuk doa dukungan serta kerja kerasnya yang sudah membantu tanpa mengenal lelah.
- ❖ Buat sahabat-sahabat tercinta atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
- ❖ Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang terutama untuk Dosen atas semua bimbingan serta ilmunya selama ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Akuntansi 15 C teruntuk waktu yang selama ini kita lalui bersama.
- ❖ Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah,puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini degan judul: **PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, PEGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG**". Maksud dari tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam pencapaian gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan kesempatan saya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat di Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah berkenan memberikan surat izin penelitian.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan masukan selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Bapak Wawan Sadtyo Nugroho, M.Si, selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu, Farida, S.E. M.Si. Ak. CA, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu kelancaran penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Akhir kata semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat khasanah keilmuan, Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	iv
MOTTO .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....	10
A. Telaah teori .....	10
1. <i>Agency Theory</i> .....	10
2. Kejelasan Sasaran Anggaran .....	14
3. Pelaporan Kinerja .....	16
4. Sistem Pelaporan .....	16
5. Pengawasan Fungsional .....	17
6. Akuntabilitas publik .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	20
C. Hipotesis .....	22
1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas publik .....	22
2. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik .....	23
3. Pengaruh pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik .....	25
4. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas publik .....	27
D. Kerangka Pemikiran .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Populasi dan Sampel .....	30
B. Data Penelitian .....	31
1. Jenis dan Sumber Data .....	31
2. Teknik Pengumpulan Data .....	31
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	32
D. Alat Analisis Data .....	34
1. Statistik Deskriptif .....	34
2. Uji Kualitas Data .....	34
3. Analisis Regresi Berganda .....	35
4. Pengujian Hipotesis .....	36
5. Uji t .....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Statistik Deskriptif Data .....	39
B. Analisis Statistik Deskriptif.....	41
C. Hasil Uji Kualitas Data .....	43
1. Uji Validitas .....	43
2. Uji Reliabilitas.....	44
3. Analisis Regresi Berganda .....	45
4. Pengujian Hipotesis .....	46
D. Pembahasan.....	52
1. Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas publik .....	52
2. Pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik .....	55
3. Pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik .....	56
4. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas publik .....	57
BAB V PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Keterbatasan .....	60
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil IHSP BPK RI.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Definisi Dan Pengukuran Variabel.....	32
Tabel 4.1 Tingkat Pegembalian Kuesioner .....	40
Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden .....	40
Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif .....	42
Tabel 4.4 Pengujian Validitas .....	43
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i> .....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas .....	45
Tabel 4.7 Hasil <i>Moderate Regressionn Analysis</i> .....	46
Tabel 4.8 Hasil Uji R <sup>2</sup> .....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikan.....	48
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F .....	37
Gambar 3.2 Penerimaan Uji T .....	38
Gambar 4.1 Hasil Uji F .....	49
Gambar 4.2 Hasil Uji t Pertama .....	50
Gambar 4.3 Hasil Uji t Kedua .....	51
Gambar 4.4 Hasil Uji t Ketiga .....	52
Gambar 4.5 Hasil Uji t Keempat .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner .....	64
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian .....	66
Lampiran 3. Tabulasi Data Akuntabilitas Publik .....	71
Lampiran 4. Tabulasi Data Kejelasan Sasaran Anggaran .....	73
Lampiran 5. Tabulasi Data Pengawasan Fungsional.....	75
Lampiran 6. Tabulasi Data Pelaporan Kinerja .....	77
Lampiran 7. Tabulasi Data Sistem Pelaporan .....	79
Lampiran 8. Hasil Output Data .....	81

## **ABSTRAK**

### **"ANALISIS PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK"**

**(Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Temanggung)**

**Oleh :**

**Risha Dwi Lestari  
NPM : 15.0102.0187**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di OPD Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber data. Populasi yang digunakan adalah karyawan yang menangani bagian keuangan di OPD Kabupaten Temanggung, seperti Kepala Dinas, Bendahara, dan Sekretaris. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang diberikan batasan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*payj analysis*) dengan bantuan program SPSS 21. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

**Kata Kunci :Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi publik dapat diukur dari sejumlah dimensi, diantaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Suatu organisasi public dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Selain itu, suatu organisasi sektor publik juga perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas.

Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang dijalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan

sistem pelaporan. Menurut Mahsun dkk (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Wulandari, 2009). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja

yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009).

Dalam keberhasilan kejelasan sasaran anggaran maka diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dihasilkan suatu pelaporan yang baik pula. Hal ini meningkatkan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga

kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat publik.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan LKPD daritahun 2014-2018**  
**Opini BPK atas LKPD Tahun 2014-2018**

No	Nama Pemda	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab Temanggung	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Magelang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kab Magelang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Wonosobo	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHSP BPK RI Semester 1 Tahun 2019

Data diatas terbukti bahwa Kabupaten Temanggung sudah membuktikan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disajikan berbagai satuan kerja maupun organisasi perangkat daerah yang ada. Diharapkan Kabupaten Temanggung dapat tetap menjaga komitmen untuk mempertahankan status WTP pada laporan keuangan tahun selanjutnya. Selain itu juga di tingkatkan semangat kerja, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Diharapkan agar Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kedepan lebih baik sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dilakukannya penelitian ini agar di dapatkan data bagaimana Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat mempertahankan opini tersebut sehingga untuk tahun berikutnya dapat mendapatkan opini WTP.

Diantara faktor-faktor tentang akuntabilitas beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

antara lain oleh Laksana (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susilowati (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulianti (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anjarwati (2012) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Laksana dan Handayani (2014) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang untuk memperoleh hasil yang relevan maka dilakukan pengembangan yang **pertama**, yaitu dengan menambahkan variabel Sistem Pelaporan. Sistem

Pelaporan diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdulah, 2005). Variabel ini ditambahkan dikarenakan adanya informasi oleh sistem akuntansi keuangan seperti sumber daya perusahaan sehingga dapat memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Hubungan antara Teori Keagenan dengan adanya implikasi kesenjangan informasi antara manager sebagai pemilik sehingga harus diadakan pengungkapan untuk mengatasi kesenjangan informasi.

Pengembangan **kedua**, penelitian sebelumnya berpedoman pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini berpedoman kepada instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung karena dari data IHPS BPK bahwa Kabupaten Temanggung sudah mendapatkan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Hal tersebut diperoleh karena Kabupaten Temanggung sudah membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung karena Temanggung sudah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama 6 tahun terakhir dan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Hal tersebut dikarenakan Penilaian WTP dari BPK tidak menjamin Kabupaten/Kota tersebut tidak ada korupsi, karena opini WTP yang diberikan hanya menilai tata kelola keuangannya yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota adalah baik bukan berarti benar, karena kalau benar semuanya harus diaudit.

Dari latar belakang masalah dan berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dijadikan indikator “Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Temanggung?
3. Bagaimana pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Temanggung ?
4. Bagaimana pengaruh Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Temanggung

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis Pelaporan Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan untuk digunakan sebagai pendukung teoritis atau kontribusi di instansi pemerintah dan bidang akuntansi sebagai pengembangan ilmu.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah teori

##### 1. *Agency Theory*

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumberdaya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu:

- a. Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi

mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik ; dan

- b. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

Menurut Schoeck (2002: 81) penerapan manajemen risiko dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko perusahaan juga dapat dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurunkan informasi asimetris dan berkontribusi

untuk menghindari perilaku oportunistik dari manajer (Kajuter et al., 2005).

Keterkaitan dari masalah keagenan adalah positif *accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) yang mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, principal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupakeuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari principal keagenan. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan

kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

Dipandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang/pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Dalam posisi sebagai pihak ketiga inilah sebenarnya peran akuntan sektor publik diharapkan berperan besar. Mengingat bahwa sebagian (atau bahkan sebagian besar) laporan yang diberikan pemerintah adalah berbentuk informasi keuangan. Akuntan (dalam hal ini sebagai auditor) mempunyai posisi penting dengan alasan bahwa; (1) dia mempunyai akses terhadap informasi keuangan, (2) dia mempunyai akses terhadap informasi manajemen, (3) dia independen, (4) dia telah mendapat pelatihan profesional, dan (5) dia bisa didapatkan (ada) (Jones, 1990).

Penelitian ini lebih fokus ke penelitian yang tertuju ke *bonding cost* karena dalam penelitian ini diharapkan aparat pemerintah dapat

mempertanggungjawabkan laporan keuangan terhadap pengguna laporan keuangan secara publik sehingga aparat pemerintah juga dapat berperilaku sesuai dengan kepentingan masyarakat atau principal. Dari penelitian ini terdapat 3 variabel independen yang termasuk dalam *bonding cost* yaitu kejelasan sasaran, pelaporan kinerja, dan sistem pelaporan dimana variabel tersebut digunakan untuk mempertanggungjawabkan semua laporan dan kinerjanya selama periode tertentu untuk masyarakat. Selain *boanding cost* dalam penelitian ini juga dijelaskan *monitoring cost* dari variabel independen pengawasan fungsional agar masyarakat juga dapat memantau dan mengamati perilaku dari aparat pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

## **2. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi

bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009).

Keberhasilan kejelasan sasaran anggaran maka diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Penyusunan anggaran diperlukan untuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memerikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaporan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

### **4. Sistem Pelaporan**

*Reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi

manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003).

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan pengertian laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut Keraf (2001: 284) dalam Rajab (2009), laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

## **5. Pengawasan Fungsional**

Menurut UU No 15 Tahun 1983 Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh para aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Subyek dari pengawasan fungsional adalah BPKP, Inpektorat Jenderal Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten Kota.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah (dahulu Badan Pengawasan Daerah) yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari berbagai organisasi bahwa semua kegiatan yang dicapai dengan rencana selanjutnya. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.

- a. Pengawasan dari dalam adalah: Pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit dari organisasi itu sendiri yang dibertindak atasnama pimpinan atau organisasi.
- b. Pengawasan dari eksternal adalah: Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi yang dibentuk dari luar organisasi dan bertindak untuk organisasi itu sendiri atau pimpinan dan biasanya permintaan oleh perusahaan.
- c. Pengawasan prepentif adalah: Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi.

- d. Pengawasan represif adalah: Pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan itu sudah berlangsung yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan.

## **6. Akuntabilitas publik**

Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengenal sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh Ariyadi, 2008).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan makin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah telah banyak dilakukan di Indonesia. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Putra (2018)	Independen : Pengawasan Fungsional, Pelaporan Kinerja Depeden : Akuntabilitas Publik terhadap kinerja Perangkat Daerah	Pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Provinsi Jambi
Dharma (2014)	Independen : Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akuntansi Dependen : Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap positif akuntabilitas instansi pemerintah sedangkan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah
Susilowati (2014)	Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja Dependen : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh, namun pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**  
**Lanjutan**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Yulianti (2014)	Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	pemerintah daerah Kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Suwandi (2013)	Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah
Wulandari (2013)	Independen : Pengawasan Fungsional Dependen : Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Kota Padang	Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik
Anjarwati (2012)	Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Dependen : Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Tegal, namun sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di instansi pemerintah di kabupaten Tegal
Pamungkas (2012)	Independen : Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Dependen : Kualitas Laporan Keuangan dan implikasinya.	Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh relative.
Santoso dan Joni (2008)	Independen : Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud	Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud.

Sumber : Dari data yang diolah, 2019

### C. Hipotesis

#### 1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas publik

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) yang dikutip dalam Kusumaningrum (2010) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada kinerja aparat pemerintahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kejelasan sasaran merupakan *bonding cost* agar aparat pemerintah dapat berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laksana (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susilowati (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulianti (2014) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari penjelasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntansi Publik karena berimplikasi terhadap akuntabilitas publik atas apa yang dikerjakan yang berhubungan dengan kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.*

## **2. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik**

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan

internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deddy dan Sherly (2010) dalam Wulandari (2009) menyatakan bahwa pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan diharapkan agar pelaksanaan yang sudah direncanakan pada suatu pemerintahan dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik. Pengawasan fungsional merupakan *monitoring cost* karena dapat mengawasi, mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku dari aparat pemerintah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laksana (2014) dengan menggunakan pengawasan fungsional sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dharma (2014) dengan

menggunakan pengawasan fungsional sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulandari (2013) dengan menggunakan pengawasan fungsional sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari penjelasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dikarenakan pengawasan fungsional dilaksanakan agar pembangunan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H2 : Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.***

### **3. Pengaruh pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik**

Pelaporan kinerja merupakan alat akuntabilitas, hambatan substansi lainya dalam mengefektifkan manajemen sektor publik dan pelaksanaan pelaporan adalah kesulitan pengukuran, mengkomunikasikan apa yang telah selesai dilakukan, dan seberapa baik dari pekerjaan itu. Secara tidak langsung, akuntabilitas sektor publik adalah baik, penerima layanan dapat mengindikasikan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan melalui pemilihan umum secara langsung. Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara regular akan

menjadi langkah kemajuan dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Pelaporan kinerja juga dapat disediakan untuk memotivasi kinerja seseorang misalnya, pegawai sektor publik, seperti banyak orang, dapat termotivasi oleh adanya kompetisi. Akan tetapi jauh lebih sulit untuk mengkomunikasikannya dengan kepentingan pegawai unit kerja organisasi, tingkat penyelesaian, dan kinerja perbandingan pengukuran kinerja dapat membantu menampilkan seberapa baik kinerja pegawai dibandingkan dengan pegawai lainnya. Penelitian variabel ini dilakukan dengan menggunakan teori keagenan diharapkan agar dapat memotivasi suatu karyawan sehingga dapat melaksanakan tanggungjawabnya pada suatu pemerintahan dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan kinerja merupakan *bonding cost* agar aparat pemerintah dapat berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sehingga dengan dilaksanakannya pelaporan kinerja yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laksana (2014) dengan menggunakan pelaporan kinerja sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dharma (2014) dengan menggunakan pelaporan kinerja sebagai variabel independennya.

Hasilnya menyebutkan bahwa pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari penjelasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dikarenakan pelaporan kinerja berfungsi sebagai alat akuntabilitas, sebagai tolak ukur suatu keberhasilan organisasi sektor publik, dan juga memotivasi pegawai sektor publik tersebut. Pelaporan kinerja dijadikan acuan untuk memacu dan memotivasi tingkat kinerja pegawai. Jika hasil pelaporan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pemimpin juga dapat meningkatkan motivasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

***H3 : Pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.***

#### **4. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas publik**

Sistem pelaporan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumberdaya perusahaan. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional dan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi.

Adanya teori keagenan diharapkan agar dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak lain sehingga

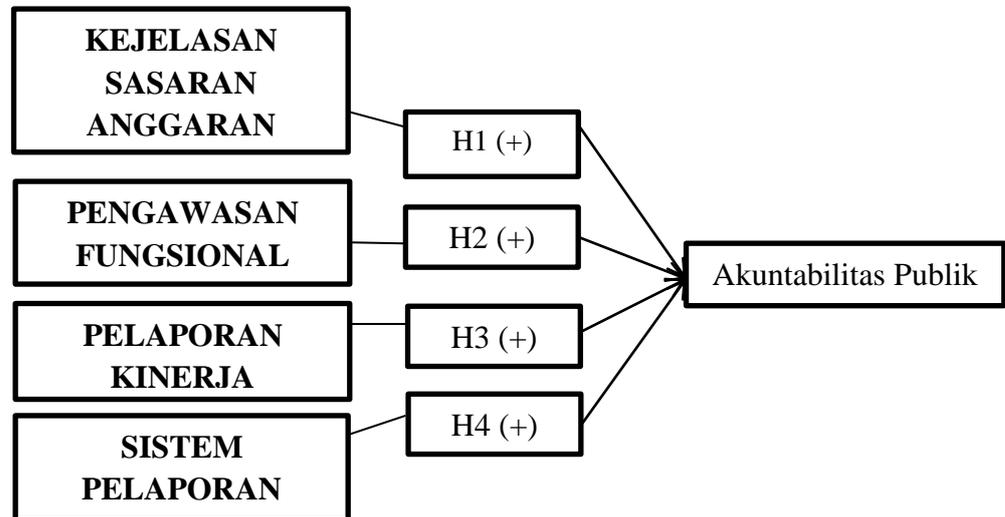
akan dapat menyelesaikan masalah ataupun pertanyaan dari pihak lain. Sehingga dengan dilaksanakannya sistem pelaporan yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik. Sistem pelaporan merupakan *bonding cost* agar aparat pemerintah dapat berperilaku sesuai dengan kepentingan principal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Susilowati (2014) dengan menggunakan sistem pelaporan sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Batang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulianti (2014) dengan menggunakan sistem pelaporan sebagai variabel independennya. Hasilnya menyebutkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Dari penjelasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena merupakan catatan yang memberikan informasi terkait pelaporan yang harus disampaikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

***H4 : Sistem Pelaporan berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud.***

#### D. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap (Nawawi, 2012). Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Temanggung OPD dipilih karena dalam Permendagri No.34 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintah yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara responden dalam penelitian adalah bendahara OPD dan staff bagian keuangan, serta pemimpin OPD karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala sub bagian keuangan, bendahara, sekretaris, pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi/keuangan/pembukuan dengan alasan bahwa mereka merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan

penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan asumsi bahwa minimal 2 tahun terlibat dalam periode tersebut sudah memiliki bekal pengalaman yang cukup.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa metoda statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey langsung dengan memberikan kuisisioner pada responden di OPD Kabupaten Temanggung.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data/sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun penilaian jawaban responden tersebut akan diberikan penilaian mengingat data-data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif maka menggunakan skala likert dengan rentang 1-5.

### C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3.1**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<b>Variabel Independen</b>			Interval
Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu misi atau tugas dari pengelola keuangan daerah untuk mendistribusi atau menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara merata dan tepat sasaran (Halim, 2012)	Menurut Abdullah (2013) 1. Tujuan Kinerja 2. Standar 3. Jangka Waktu 4. Sasaran Prioritas 5. Tingkat Kesulitan 6. Koordinasi	Interval
Sistem Pelaporan	Laporan keuangan yang ditambah informasi lain yang saling berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang telah disediakan oleh sistem akuntansi keuangan (Wardani, 2008)	Menurut Susanto (2013) 1. Relevan 2. Tepat waktu 3. Dapat diandalkan 4. Mudah dimengerti 5. Dapat dibandingkan	Interval
Pengawasan Fungsional	Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Wulandari, 2013)	Menurut Wulandari (2013) 1. Persiapan pemeriksaan 2. Pelaksanaan pemeriksaan 3. Pelaporan pemeriksaan 4. Tindak lanjut pemeriksaan	Interval

**Tabel 3.1**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Skala</b>
Pelaporan Kinerja	Merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Sofyandi, 2008)	Menurut Sofyandi (2018) 1. Motivasi meningkatnya kinerja 2. Mengkomunikasikan tingkat manajemen 3. Peyampaiaan informasi secara tepat kepada masyarakat	Interval
<b>Variabel Dependen</b>			
Akuntabilitas Publik	Kewajiban pihak pemegang saham ( <i>agent</i> ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi 2013)	Menurut Putra (2013) 1. Akuntabilitas kejujuran 2. Akuntabilitas hukum 3. Akuntabilitas proses 4. Akuntabilitas program 5. Akuntabilitas kebijakan	Interval

## **D. Alat Analisis Data**

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghazali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, variansi, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

### **2. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji Validitas instrument kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *unidimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali,2018).

### **3. Analisis Regresi Berganda**

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan Regresi Linier Berganda :

$$AP = \alpha + \beta_1 \text{KSA} + \beta_2 \text{SP} + \beta_3 \text{PF} + \beta_4 \text{PK} + e$$

Keterangan :

AP	= Akuntabilitas Publik
KSA	= Kejelasan Sasaran Anggaran
SP	= Sistem Pelaporan
PF	= Pengawasan Fungsional
PK	= Pelaporan Kinerja
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien
e	= <i>Error</i>

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

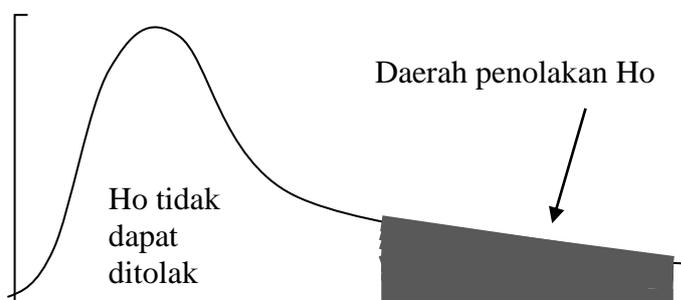
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Uji  $R^2$  menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Sistem Pelaporan (SP), Pengawasan Fungsional (PF), dan Pelaporan Kinerja (PK) terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Publik (AP). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

##### b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji Statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen

mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan lebih *fit* atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang  $df = k$  dan derajat kebebasan penyebut  $(df) = n - k - 1$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria :

- a) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $P_{value} < \alpha = 0,05$ , maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (fit).
- b) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $P_{value} > \alpha = 0,05$ , maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit).



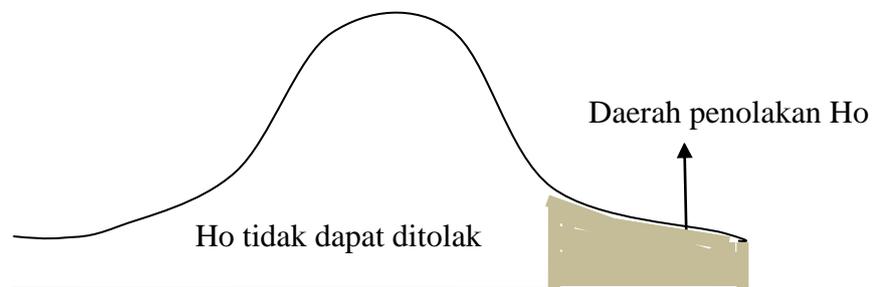
**Gambar 3.1**  
**Penerimaan Uji F**

## 5. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing

koefisien regresi dengan  $t_{tabel}$  (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df=n-1$  (Ghozali,2018).

- a) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $P_{value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $P_{value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
**Penerimaan Uji t**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Sistem Pelaporan, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Temanggung. Sedangkan Pengawasan fungsional dan Pelaporan Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Temanggung.
2. Keterkaitan antara teori agensi dengan kejelasan sasaran anggaran adalah dengan adanya kejelasan sasaran anggaran diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada terkait kesalahan sasaran dari suatu anggaran, sehingga anggaran dapat menjadi tepat sasaran. Selain itu pelaporan keuangan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
3. Keterkaitan antara teori agensi dengan sistem pelaporan adalah dengan adanya sistem pelaporan diharapkan organisasi perangkat daerah dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak lain sehingga akan dapat menyelesaikan masalah ataupun pertanyaan dari pihak lain. Sehingga sistem pelaporan dapat menunjang akuntabilitas

publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari aparat pemerintah untuk pengguna laporan keuangan.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisasikan kesemua objek mengenai akuntabilitas publik.
2. Penelitian ini menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, pelaporan kinerja dan sistem pelaporan yang hanya dapat menjelaskan sebagian terkait masalah akuntabilitas publik.

## **C. Saran**

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain :

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya OPD karesidenan kedu atau provinsi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, seperti gaya kepemimpinan (Perwirasari, 2016). Dikarenakan gaya kepemimpinan sudah dapat memuat aspirasi dan keterbukaan bagi semua kalangan dan menjadikan perhatian yang tinggi dalam pengembangan akuntabilitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aap, A. 2010. “ *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten* “.Klaten. Artikel Penelitian
- Abdullah Sani, Ridwan. 2013. *Ionovasi Pembelajaran*. Bumi Aksara: Jakarta
- Anjarwati, Mei. 2012. “ *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* “. Jurnal Akuntanika, Vol 1, No. 2, Oktobeer-November 2012 (ISSN 2252-6765)
- IHPS BPK RI Semester II Tahun 2018*
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta
- Bastian, I., 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Donaldson. Lex, Davis James H, 1991 “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return” *Australian Journal of Management*. Vol.16 iss. 1.
- Halim. A, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat
- Halim. A, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah APBD*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Ihyaul Ulum MD. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Laksana, Agung, Bestari Dwi Handayani. 2014. “ *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang* “. Jurnal Akuntanika, Vol 3, No. 2, Januari-Mei 2014 (ISSN 2252-6765)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2005
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Handoko, Hani. 1999. *Manajemen personalia dan sumber daya manudia*. Jakarta: PT Rafika Adita. Hlm.360

- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Insan Madani.
- Putra, S.R. 2013.*Ukuran Akuntabilitas Kinerja Dan Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Perwirasari, Putri. 2016. “ *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah* “. Skripsi, Universitas Negeri. Semarang.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Pengawasan Fungsional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyandi, Herman. 2008. *Pelaporan Kinerja dan Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waedani, IGK, 2008. *Sistem Pelaporan Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia
- Wulandari, Nur. 2013. *Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Kualitas Pelayanan*.Jakarta. Salemba Empat.
- Wulandari, Indah. 2013. “*Pengaruh pengawasan fuungsionnal dalam menunjang akuntabilitas public pada pemerintahan kota padang*”. Skripsi, Universitas Negeri. Semarang.